

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, sehingga penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk masa waktu 5 (Lima) tahun kedepan dapat terselesaikan dan telah diadakan review oleh Tim Renstra dari Bappeda Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Perda nomer 5 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2008 tentang pembedaan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rembang dan Perbup nomor 51 Tahun 2008 tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Bahwa uraian tugas urusan Komunikasi dan Informatika masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo).

Berdasarkan Perbup Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, dan mulai sejak tanggal 2 Januari 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Rembang pada umumnya dan lebih khusus terselenggaranya system komunikasi dan informatika yang handal melalui pengelolaan yang profesional guna menunjang kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Rembang sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Mengingat besarnya manfaat dokumen ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahun.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya rencana strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rembang, 22 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rembang

**Ir. WARTONO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600110 199103 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB IPENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG.....	13
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
B. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika.....	22
C. Sarana dan Prasarana yang ada padaDinas Komunikasi dan Informatika .....	23
D. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.....	25
Kabupaten Rembang.....	25
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDinasKomunikasi dan Informatika.....	32
BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	34
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinasKomunikasi dan Informatika.....	34
B. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	38
C. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	41
D. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah.....	42
E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Strategis ( KLHS ).....	44
F. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	45
BAB IV.....	46
TUJUAN DAN SASARAN.....	46
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	52
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VIIINDIKATOR KINERJADINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	67
BAB VIIIPENUTUP.....	70
A. Pedoman Transisi.....	70
B. Kaidah Pelaksanaan.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Dinas.....	23
Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Anggaran.....	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan.....	36
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Tahun 2016-2019.....	48
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020-2021.....	50
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan.....	54
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika....	56
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.....	58
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Tahun 2016-2019.....	68
Tabel 7.2 Indikator Kinerja 2019-2021.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	14
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Dalam menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai rencanapendanaan yang memadai, dan rasional dengan mengacu pada kemampuan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana strategi (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, selain itu Rencana Strategi (Renstra) ini dimaksudkan untuk menerjemahkan visi – misi, program, dan kebijakan Bupati Rembang dalam bidang komunikasi dan informatika sehingga kesuksesan kepemimpinan Bupati Rembang dalam sektor komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan performa Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri (Dinkominfo).

## **B. Landasan Hukum**

1. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi \(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881\);](#)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang



[Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042\);](#)

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- [20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 \(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28\);](#)
- [21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 \(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110\);](#)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 128);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019);
26. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;](#)
27. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah Dinas Komunikasi & Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja di bidang komunikasi informatika selama 5 tahun kedepan (2016 – 2021).

#### 2. Tujuan

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja tahunan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama periode 2016-2021

- b. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- c. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Rembang sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang**

Bab ini menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

##### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaahan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra K/L, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu

strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

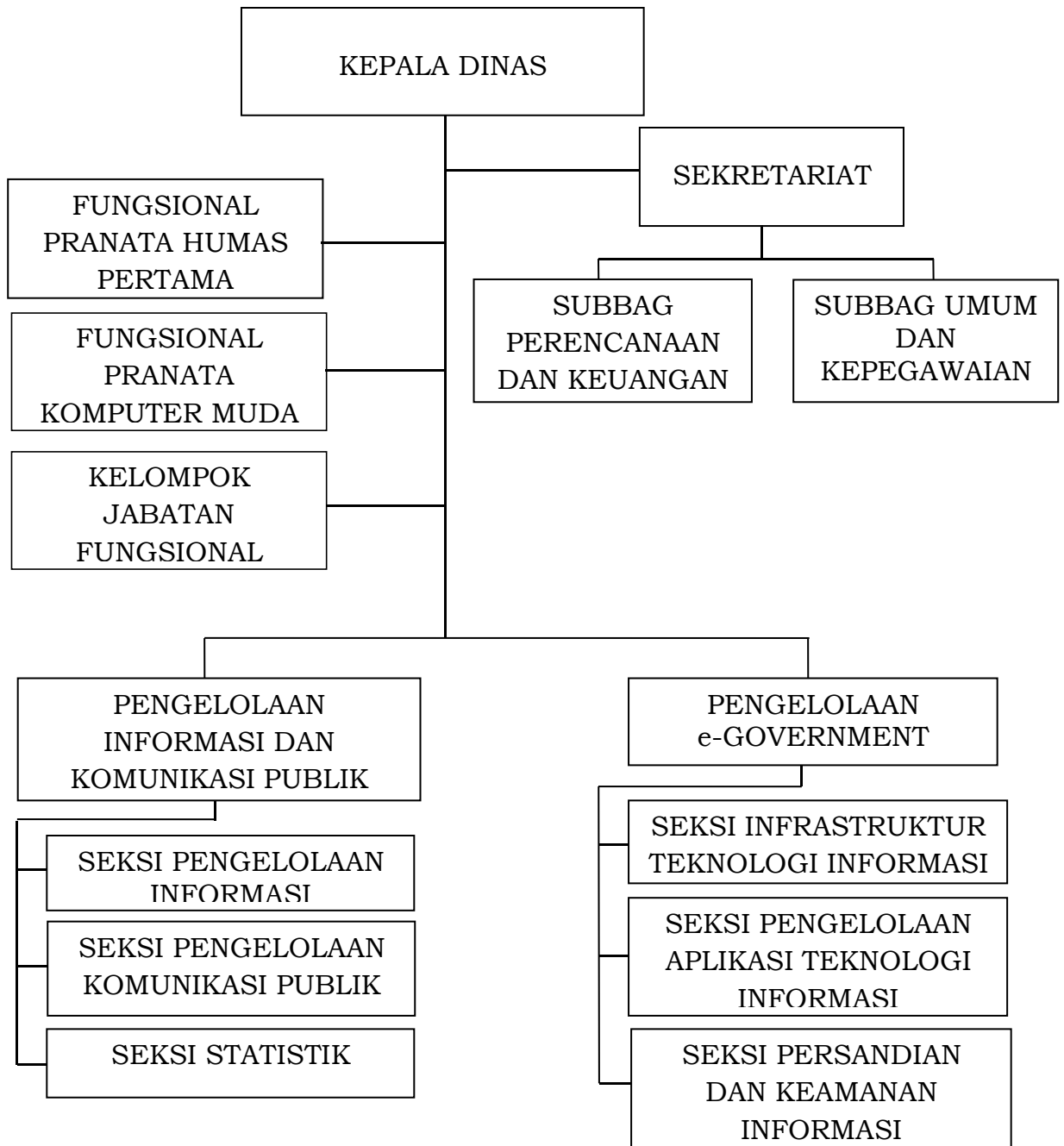
**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REMBANG**

**A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat dengan 2 (Dua ) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi.
  - b. Seksi Pengelolalan Komunikasi Publik.
  - c. Seksi Statistik.
- 4) Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
  - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
  - b. Seksi Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi
  - c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- 5) Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. Fungsional Pranata Humas Pertama
  - b. Fungsional Pranata Komputer Muda
- 6) Terperinci tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



## **1. KEPALA DINAS**

### **a. TUGAS POKOK**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### **b. FUNGSI :**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. URAIAN TUGAS**

1. Menjabarkan kebijakan strategis penierintah daerah di bidang komunikasi dan informatika guna menentukan sasaran kebijakan;
2. Menyusun kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan program kerja di bidang komunikasi dan infomatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan sasaran program kerja di komunikasi dan informatika guna menentukan prioritas program;

5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
7. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;
8. Menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
9. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika;
10. Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
12. Menyelenggarakan tugas bidang komunikasi dan informatika;
13. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
14. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
16. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
17. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.



## **2. SEKRETARIS**

### a. TUGAS POKOK :

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### b. FUNGSI :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- c. URAIAN TUGAS :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Merencanakan program kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  3. Merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
  6. Menyediakan data dan informasi bidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
  7. Menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
  9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
  10. Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
  11. Menyediakan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LKPJ/LPPD, pengawasan melekat, pengendalian operasional kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
13. Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
14. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar guna tercapainya tertib administrasi;
15. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

### **3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK.**

#### **a. TUGAS POKOK**

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik

#### **b. FUNGSI ;**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

- Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik;
  - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, Statistik;
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- c. URAIAN TUGAS :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
  6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
  7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika;
  8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
  9. Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

10. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
14. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

#### **4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN e- GOVERNMENT**

##### **a. TUGAS POKOK**

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan *e-Government* yang terdiri dari Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian serta Pengelolaan Data dan Aplikasi, dan Statistik.

##### **b. FUNGSI**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi;
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya
- c. URAIAN TUGAS :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
  6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
  7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika.

## **B. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika**

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebanyak 30 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal :
  1. Pendidikan Pasca Sarjana : 3 Orang
  2. Pendidikan Sarjana : 20 Orang
  3. Pendidikan D 4 : 0 Orang
  4. Pendidikan D 3 : 1 Orang

5. Pendidikan Sekolah Menengah Umum : 7 Orang
6. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama : 1 Orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan :

1. Golongan IV : 4 Orang
2. Golongan III : 21 Orang
3. Golongan II : 5 Orang
4. Golongan I : 1 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon :

1. Eselon II.b : 1 Orang
2. Eselon III.a : 1 Orang
3. Eselon III.b : 2 Orang
4. Eselon IV.a : 8 Orang

### **C. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika**

Adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Gedung kantor	250 M3	1	Baik	Memakai gedung binangkit
2	Meja Kerja	Buah	33	Baik	
3	Kursi Kerja	Buah	33	Baik	
4	Filling Kabinet	Buah	5	Baik	
5	Laptop	Buah	24	Baik	

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	Pc Unit	Buah	1	Baik	
7	Lemari Arsip	Buah	1	Baik	
8	Lemari Kayu	Buah	10	Baik	
9	Printer	Buah	18	Baik	
10	TV	Buah	2	Baik	
11	Kipas Angin	Unit	9	Baik	
12	AC Unit	Unit	7	Baik	
13	Sepeda Motor	K 9711 HD	1	Baik	
14	Sepeda Motor	K 9756 HD	1	Baik	
15	Sepeda Motor	K 9708 HD	1	Baik	
16	Sepeda Motor	K 9726 FD	1	Baik	
17	Sepeda Motor	K 9728 FD	1	Baik	
18	Sepeda Motor	K 9719 LD	1	Baik	
19	Sepeda Motor	K 9711 LD	1	Baik	
20	Sepeda Motor	K 9712 LD	1	Baik	
21	Sepeda Motor	K 9603 LD	1	Baik	
22	Sepeda Motor	K 9692 LD	1	Baik	
23	Mobil	K 9512ED	1	Baik	
24	Mobil	K 9503 AD	1	Baik	
25	Mobil	K 9504 AD	1	Baik	
26	Meja Rapat	Buah	4	Baik	
27	Kursi Lipat	Buah	50	Baik	
28	Rak Kayu	Buah	7	Baik	
29	Sepeda Motor	K 9696 JD	1	Baik	
30	Sepeda Motor	K 9703 JD	1	Baik	
31	Sepeda Motor	K 9648 MD	1	Baik	
32	Sepeda Motor	K9639 MD	1	Baik	
33	Server	-	1	Baik	



**D. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rembang**

Kinerja Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Rembang 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2  
Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Indikator	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I						
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	29	58	62	62	165
2	Jumlah Penyiaran Radio	14	14	14	14	14
3	Cakupan Layanan SST	5.500	5.500	5.500	5.450	5.500
4	Jumlah aplikasi e - government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	15	20	20	20	22
5	Persentase PD telah memiliki website ( % )	86,97	86,97	100	100	100
6	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	21	21	21	21	21
II	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :					
1	Media Massa seperti majalah, radio dan televisi;	14	14	14	14	14
2	Media baru seperti website (media online)	1	1	1	1	1
3	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1	1	1	1	1
4	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi	-	-		-	-

No.	Indikator	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	dan lokakarya; dan / atau					
5	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	2	2	2	2	2
III 1	Cakupan Pengawasan menara BTS di Kabupaten Rembang	135	131	148	156	161
2	Jumlah prosentase pengawasan radio siaran dan radio Komunikasi	100	100	100	100	100

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
3. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;  
Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya tantangan dan hambatan. Di bawah ini beberapa tantangan dan hambatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang

dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternative pemecahan masalah terhadap tantangan dan hambatan tersebut antara lain :

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;

3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika dengan capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Anggaran Program dan Pendanaan Target Realisasi Tahun 2014-2018**

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Renstra SKPD Tahun ke- dalam jutaan					Realisasi Capaian pada Tahun ke- dalam ribuan				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>												
1	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	%	27	30	27	27	30	29	38	29	29	38
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah penyiaran radio	%	12	12	10	12	12	9,14	12	9,14	9,14	12
3	Pemeliharaan Menara dan Jaringan Web Lan	Cakupan layanan SST	%	5	5	5	5	5	4,50	4,50	4,45	4,50	4,50

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Renstra SKPD Tahun ke- dalam jutaan					Realisasi Capaian pada Tahun ke- dalam ribuan				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Pembinaan dan Pengembangan LPSE	Jumlah aplikasi E-Gov dilingkungan pemerintah Kabupaten/ Kota	%	15	18	15	15	18	14,50	17,61	14,50	14,50	17,610
5	Pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi public	Prosentase PD telah memiliki Website(%)	%	40,0	70,0	85,0	85,0	85,0	39,1	86,9	86,9	86,9	86,9
6	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	%	5	5	5	5	5	7	7	21	21	22
7	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Media baru seperti website, media online	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	<b>Pengawasan , Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informatika</b>												
1	Pengawasan , dan Pengendalian Menara Komunikasi	Jumlah menara BTS di Kabupaten Rembang	%	111	120	130	131	133	111	129	135	135	135

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Renstra SKPD Tahun ke- dalam jutaan					Realisasi Capaian pada Tahun ke- dalam ribuan				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	Jumlah prosentase pengawasan radio siaran dan radio komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>											
1	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	120	130	120	120	130	119,450	128,611	118,750	119,450	128,611
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah penyiaran radio	165	160	160	165	160	162,233	158,900	157,421	162,233	158,900
3	Pemeliharaan Menara dan Jaringan Web Lan	Cakupan layanan SST	40	40	40	40	40	39,150	39,150	39,150	39,150	39,150

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi public	Prosentase PD telah memiliki Website(%)	40	40	40	40	40	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
5	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	50	50	50	50	50	49,150	49,150	49,150	49,150	49,150
6	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Media baru seperti website, media online	60	60	60	60	60	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
<b>02</b>	<b>Pengawasan , Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informatika</b>											
1	Pengawasan , dan Pengendalian Menara Komunikasi	Jumlah menara BTS di Kabupaten Rembang	70	70	70	70	70	68,799	69,00	68,705	68,799	69,000
2	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	Jumlah prosentase pengawasan radio siaran dan radio komunikasi	20	20	20	20	20	19,800	19,800	19,950	19,800	19,800

## **E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**



## **Tantangan**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas. pada tahun 2019 perangkat daerah yang memiliki website baru sebesar 100%, dan informasi yang disajikan belum *up to date*.
- 2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government* dan penerapan *blueprint e-Government* belum optimal. Jumlah aplikasi e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 22 aplikasi pada tahun 2019.
- 3) Belum optimal unit pengaduan *online* terpadu.
- 4) Belum tersedianya data base dan data informasi yang valid dan *uptodate*.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan persandian.
- 6) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat.

## **Peluang**

- 1) Adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
- 3) Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan e-gov.
- 4) Mengoptimalkan sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government* dan penerapan *blueprint e-Government*.
- 5) Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk penyebarluasan informasi publik.
- 5) Penyediaan data base dan data informasi yang Akurat Credible dan Terintegrasi.
- 6) Peningkatan pengelolaan persandian.

### **BAB III**

#### **ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sesuai kewenangan undang-undang 23 tahun 2014 mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Rembang, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten Rembang dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan e-Government untuk seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Rembang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### **1. Permasalahan Sekretariat:**

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **2. Permasalahan Bidang E-Government:**

- a. Kurang optimalnya Pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Masih terbatasnya sarana penunjang untuk mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- c. Tercapainya penghargaan terhadap hak dan karya cipta orang lain dalam hal ini software legal di seluruh masyarakat Rembang pada umumnya dan instansi pemerintahan pada khususnya;

### **Permasalahan Persedian:**

- d. Belum maksimalnya keamanan informasi melalui persandian di Kabupaten Rembang;

### **Permasalahan Statistik:**

- e. Belum tersedianya data statistik sektoral.

## **3. Permasalahan Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**

- a. Belum terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- b. Belum terkelolanya nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten Rembang.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan**  
**Sarana Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Kurangnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Belum optimalnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Belum optimalnya penyusunan Renstra, penyusunan Renja OPD
2	Kurangnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Belum optimalnya manajemen administrasi pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Belum optimalnya penyusunan laporan pengendalian kegiatan; Penyusunan laporan Renja tri wulanan; Penyusunan LKJIP; Penyusunan LPPD
3	Kurangnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya peningkatan keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi publik	
4	Kurangnya peningkatan E-Government	Belum optimalnya Pengembangan E-Government	Belum optimalnya pengembangan dan optimalisasi pengelolaan E-Government	

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Pekerjaan</b>
5	Kurangnya peningkatan pelayanan informasi publik, cepat tangap dan tranparan.	Belum optimalnya Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Kurangnya pembinaan Layanan Kehumasan	
6	Kurangnya peningkatan pelayanan informasi publik, cepat tangap dan tranparan.	Belum optimalnya Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Kurangnya pembinaan Layanan Kehumasan	
7	Kurangnya peningkatan pelayanan informasi publik, cepat tangap dan tranparan.	Belum optimalnya Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi	
8	Kurangnya peningkatan ketersediaan data statistic	Belum optimalnya program penyelenggaraan statistik sektoral	Belum optimalnya penyusunan Data Statistik Sektoral	Belum optimalnya pengumpulan open data
9	Kurang meningkatnya ketersediaan data statistic	Belum optimalnya program penyelenggaraan statistik sektoral	Belum optimalnya penyusunan data statistik sektoral	
10	Kurang meningkatnya keamanan persandian daerah	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	Belum optimalnya pengelolaan persandian daerah	

## **B. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan 5 ( Lima )tahun kedepan pada tahun 2021. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

**Masyarakat sejahtera** adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Semangat Kebersamaan** adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama.

**Pemberdayaan Masyarakat** adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

**Kewirausahaan** adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”.

Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kedaulatan pangan serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial, serta mengembangkan budaya lokal.
7. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas visi misi bupati dan wakil bupati terpilih:

#### **1. Tujuan Misi I**

Dalam melaksanakan Misi I yaitu *“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”* maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

- a. Terwujudnya *Good Governance*;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi;
- c. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.



### C. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

#### **D. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dituntut untuk mampu menjawab Visi Pembangunan Kabupaten Rembang 2013-2018 melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada periode 2013-2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan pelayanan Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menetapkan Visi 2013-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

**“MENUJU PELAYANAN KOMINFO YANG AMANAH,  
BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA DAN BERKELANJUTAN”**

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk itu, upaya dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Rembang 2013-2018, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menetapkan Misi 2013-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Struktur Kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi;

- Mewujudkan Sarana Prasarana yang Menunjang kinerja;
  - Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki Kompetensi sesuai bidangnya.
2. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi

#### **E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Strategis ( KLHS )**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Perlu diketahui bahwa aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah

Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031, Kabupaten Rembang.

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif.
2. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dengan integrasi wilayah.

#### **F. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh.
2. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam pelayanan komunikasi dan informasi.

Meningkatkan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat mudah dan merata serta meningkatkan efektifitas pelayanan komunikasi dan informatika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANGDILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN,MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN.”**Yang merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam minimal lima tahun mendatang. Denganmempertimbangkan Tugas dan Fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang guna mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif, dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”. Dapat dirumuskan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh dengan sasaran. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi, dengan sasaran:
  - Meningkatkan e-government
  - Meningkatnya pelayanan informasi publik cepat, tanggap, dan transparan.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan data statistik.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi, meningkatnya keamanan persandian daerah.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)	-	-	60.55	70.00
2	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)	100	100	100	100



<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan E-Government.</li> <li>- Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks SPBE</li> <li>- Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)</li> </ul>	-	-	-	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik.	Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan	70.00	75.00	80.00	85.00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %	100	100	100	100

**Tabel 4.2**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)	75.00	80.00
2	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)	100	100

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan E-Government.</li> <li>- Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks SPBE</li> <li>- Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)</li> </ul>	-	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik.	Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan	90.00	95.00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Strategi dan kebijakan dari masing masing misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Strategi

1. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan sistem pelayanan informasi publik dan penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral;
5. Peningkatan keamanan informasi.

#### B. Kebijakan

1. Peningkatan kualitas dan sistem perencanaan kinerja yang matang;
2. Peningkatan kualitas sistem pelaporan yang cepat tepat dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang informasi dan telekomunikasi secara berkelanjutan tuntutan kemajuan teknologi;
5. Peningkatan kualitas layanan e-gov melalui peningkatan infrastruktur dan standart layanan;
6. Pelayanan layanan integrasi dan interoperability antar

layanan data statistik sektoral;

7. Peningkatan standart keamanan informasi dengan persandian sarana prasarana sesuai kemajuan teknologi;

**Tabel 5.1**  
**Tabel Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program OPD	Kegiatan OPD	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja OPD
2	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan	Program manajemen administrasi pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan laporan pengendalian kegiatan; Penyusunan laporan Renja tri wulanan; Penyusunan LKJIP; Penyusunan LPPD
3	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi	Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Program peningkatan keterbukaan informasi publik	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	
4	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya E Government	Program Pengembangan E-Government	Pengembangan dan Optimalisasi pengelolaan E-Government	
5	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.	Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Pembinaan Layanan Kehumasan	
6	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.	Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Pembinaan Layanan Kehumasan	

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program OPD	Kegiatan OPD	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.	Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
8	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Pengumpulan open data
9	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyusunan Data Statistik Sektoral	
10	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	meningkatkan keamanan persandian daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Pengelolaan persandian daerah	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan serta memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menetapkan program dan kegiatan jangka menengah. Rincian kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	PROGRAM	Anggaran
1	<i>Pogram Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</i> - Peningkatan Manajemen administrasi pelayanan umum - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	<i>Rp. 1.270.700.000</i>  Rp. 1.068.700.000 Rp. 147.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 10.000.000
2	<i>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	<i>Rp. 40.000.000</i>  Rp. 30.000.000 Rp. 10.000.000
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik - Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	<i>Rp. 10.000.000</i> Rp. 10.000.000
4	<i>Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik</i> - Pembinaan kehumasan - Pengelolaan informasi dan dokumentasi	<i>Rp. 535.000.000</i> Rp. 130.000.000 Rp. 405.000.000
4	<i>Program Pengembangan E-Government</i> - Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-Government	<i>Rp. 1.658.000.000</i> Rp. 1.658.000.000



NO	PROGRAM	Anggaran
6	<i>Program penyelenggaraan statistik sektoral</i> - Penyusunan Data Statistik Sektoral - Pengelolaan dan pengembangan data elektronik	Rp. 820.000.000 Rp. 375.000.000 Rp. 445.000.000
7	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</i> - Pengelolaan Persandian Daerah	Rp. 175.000.000 Rp. 175.000.000

Selengkapnya, rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Meningkatkan E-Government</b>	<b>Terwujudnya E-Government</b>	<b>Meningkatnya persentase perangkat daerah telah memiliki website aktif</b>	<b>Program pengawasan, pengendalian Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>	<b>135</b>
			Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Update Data Menara Telekomunikasi	147 menara	100%	-	100%	65	100%	75	100%	72	100%	85
			Pengawasan dan pembinaan telekomunikasi dan teknologi informasi	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan warnet dan sosialisasi internet sehat		100%	-	100%	20	100%	20	100%	33	100%	35
			Pengawasan dan pembinaan radio siaran dan radio komunikasi	Terwujudnya pemantauan siaran radio di Kabupaten Rembang	11 lembaga penyiaran	100%	-	100%	10	100%	20	100%	11	100%	15

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
<b>Meningkatkan penyebaran informasi multimedia</b>	<b>Meningkatkan penyebaran informasi berbagai media</b>	<b>Meningkatnya persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>405</b>	<b>100%</b>	<b>435</b>	<b>100%</b>	<b>515</b>
			Pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi public	Terwujudnya pelayanan informasi publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 dan petunjuk pelaksanaannya	45 Orang	100%	-	100%	60	100%	100	100%	68	100%	100
			Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan FK Metra	Terwujudnya KIM dan FK Metra		100%	-	100%	-	100%	75	100%	27	100%	50
			Pengembangan dan pengelolaan website	Terwujudnya pengelolaan website		100%	-	100%	60	100%	40	100%	65	100%	65
			Penyelenggaraan layanan aduan masyarakat	Terwujudnya layanan aduan masyarakat		100%	-	100%	-	100%	190	100%	275	100%	300

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
<b>Meningkatkan penyebaran informasi multimedia</b>	<b>Meningkatnya penyebaran informasi berbagai media</b>	<b>Meningkatnya persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terwujudnya informasi pemerintah daerah		100%	-	100%	-	100%	75	100%	50	100%	50
			Layanan monitoring isu publik melalui media massa dan media sosial	Terwujudnya layanan monitoring isu publik		100%	-	100%	-	100%	75	100%	50	100%	50
<b>Meningkatkan penyebaran informasi multimedia</b>	<b>Meningkatnya penyebaran informasi berbagai media</b>	<b>Meningkatnya persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>
			Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi		100%	-	100%	-	100%	10	100%	10	100%	30

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
<b>Meningkatkan pelayanan informasi publik</b>	<b>Meningkatnya pelayanan informasi publik yang cepat tanggap transparan dan prima</b>	<b>Meningkatnya persentase pelayanan informasi public</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>245</b>	<b>100%</b>	<b>660</b>	<b>100%</b>	<b>771</b>	<b>100%</b>	<b>830</b>
			Pemeliharaan menara dan jaringan wave lan	Terwujudnya pemeliharaan menara dan jaringan wave lan		100%	-		95	100%	250	100%	300	100%	350
<b>Meningkatkan pelayanan informasi publik</b>	<b>Meningkatnya pelayanan informasi publik yang cepat tanggap transparan dan prima</b>	<b>Meningkatnya persentase pelayanan informasi public</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>
			Penyelenggaraan e - Government	Terpenuhinya penyelenggaraan e - Government		100%	-	100%	-	100%	150	100%	150	100%	150
<b>Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan informasi data statistik yang uptodate</b>	<b>Meningkatnya persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>330</b>	<b>100%</b>	<b>350</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
			Penyusunan dan Pengeumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terwujudnya data/informasi publikasi statistic	50 buku	100%	-	100%	85	100%	300	100%	330	100%	350
			Pemeliharaan dan Pengembangan Pengelolaan data Elektronik	Terwujudnya Operabilitas Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Rembang		100%	-	100%	-	100%	250	100%	275	100%	300

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh</b>	<b>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan</b>	<b>Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan Evaluasi kinerja SAKIP (Formulasi : Jumlah capaian indikator kinerja / jumlah target indikator kinerja)</b>		<b>3</b>	<b>130</b>	<b>3,5</b>	<b>135</b>	<b>100%</b>	<b>135</b>
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan							
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh</b>	<b>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan</b>	<b>Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan Evaluasi kinerja SAKIP (Formulasi : Jumlah capaian indikator kinerja / jumlah target indikator kinerja)</b>							
			Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah capaian indikator kinerja	147 menara	100%	80	100%	85	100%	85
<b>Meningkatkan Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Formulasi diukur oleh Kominfo)</b>	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>Persentase informasi yang disampaikan ke publik (Jumlah informasi yang disampaikan ke publik : Jumlah informasi publik yang wajib disampaikan)</b>		<b>70 Pemohon</b>	<b>435</b>	<b>80 Pemohon</b>	<b>435</b>	<b>100%</b>	<b>515</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
			Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	45 Orang	100%	70	100%	70	100%	100
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya E-government</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Program Pengembangan E-government. Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-government</b>	<b>Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi</b>		<b>2,75%</b>	<b>4.000</b>	<b>2,85%</b>	<b>4.000</b>	<b>2,85%</b>	<b>8.000</b>
			Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-government	Jumlah layanan tata kelola SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik)		2,75%	4.000	2,85%	4.000	2,85%	8.000
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan</b>	<b>Skor KIP (Formulasi = Skor keterbukaan informasi publik)</b>	<b>Program pengembangan informasi dan pengelolaan komunikasi publik</b>	<b>Persentase OPD yang menyajikan data dengan lengkap</b>		<b>100%</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>	<b>600</b>		<b>1.200</b>
			Kegiatan : Pembinaan dan layanan kehumasan	Jumlah OPD yang dibina		100%	30	100%	30	100%	30
			Kegiatan : Pembinaan dan layanan kehumasan	Jumlah forum komunikasi publik masyarakat yang dibina		<b>100%</b>	<b>830</b>	<b>100%</b>	<b>830</b>	<b>100%</b>	<b>830</b>
			Kegiatan : Pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah informasi dan dokumentasi yang dikelola		<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan data statistik</b>	<b>Persentase pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan</b>	<b>Program Penyelenggaraan statistik sektoral</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang tersusun</b>		<b>100%</b>	<b>350</b>	<b>100%</b>	<b>350</b>	<b>100%</b>	<b>350</b>
			Kegiatan : Penyusunan data statistik sektoral	Jumlah data statistik setoral yang tersedia	50 buku	10,26%	500	12,82%	500	12,82%	1000
			Kegiatan : Penyusunan data statistik sektoral	Jumlah OPD yang berkontribusi dalam sistem satu data							
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya keamanan persandian daerah</b>	<b>Indeks KAMI (keamanan informasi)</b>	<b>Program : Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah</b>	<b>Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga keamanannya</b>		<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)
			Kegiatan : Pengelolaan persandian daerah	Jumlah berita daerah yang disampaikan		100%	400	100%	400	100%	800

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJADINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 2016–2021 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika diindekasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan RPJMD 2016-2021 maka dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang tercantum dalam kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang diinginkan pada periode Renstra yang dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**  
**Rembang tahun 2016-2019**

No	Aspek/Bidang/ urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019			
1	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	2,43	2,62	2,81	3,01	3,20			3,50
2	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	85	90	95	95	95			95
3	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	86,97	86,97	100	100	100			100
4	Persentasi ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	60,3	70	75	80	85			100
5	Persentasi surat/santel yang dikelola	%	100	100	100	100	100			100

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**  
**Rembang Tahun 2019-2021**

No	Aspek/Bidang/ urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
							2019	2020	2021	
1	Indeks SPBE (Pemeringkatan E Government)	Angka					2,35	2,76	2,85	2,85
2	Skor KIP	Skor					60,55	70	75	75
3	Persentase pelayanan informasi publik yang cepat, tanggap dan transparan	%					100	100	100	100
4	Indeks KAMI	Angka					2,70	2,75	2,85	2,85

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Pedoman Transisi**

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 2016-2021 ini merupakan pedoman/acuan untuk merencanakan program kegiatan tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang di sertai dengan perkiraan/indikasi anggaran yang dibutuhkan. Renstra ini juga memuat berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.